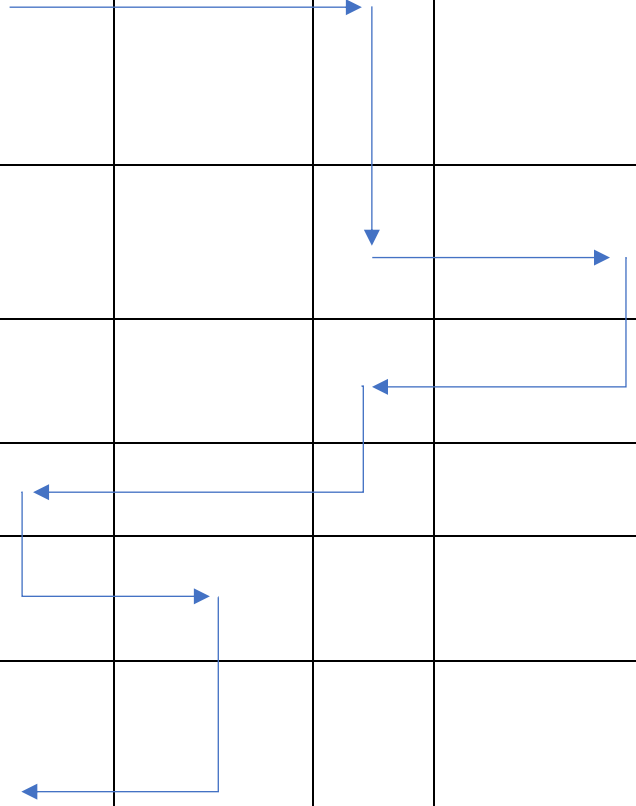
KEMENTERIAN HUKUM **KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BALI** **DIVISI PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM**	Nomor SOP	:	W.20. 2576.OT.02.02
	Tanggal Pembuatan	:	Mei 2025
	Tanggal Revisi	:	
	Tanggal Efektif	:	Mei 2025
	Disahkan oleh	:	**KEPALA KANTOR WILAYAH**
			Ditandatangani secara elektronik oleh : **Wahyu Eka Putra** **NIP. 198105222000121002**
	NAMA SOP		**Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Hukum**

Dasar Hukum	**Kualifikasi Pelaksana**
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum; 3. Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dana dan Pengawasan Bantuan Hukum Nomor :PHN.HN.04.03-810	1. Mampu mengoperasikan komputer 2. Memahami Aplikasi Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (SID Bankum) 3. Memahami proses pemantauan dan evaluasi bantuan hukum
Keterkaitan	**Peralatan/Perlengkapan**
1. Pemberi Bantuan Hukum (PBH) 2. Penerima Bantuan Hukum	1. Komputer/printer/scanner 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Data Pemberi dan Penerima Bantuan Hukum 4. Data penyerapan anggaran bantuan hukum
Peringatan	**Pencatatan dan Pendataan**
	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

PROSEDUR

NO.	AKTIVITAS	PANWASDA (PANITIA PENGAWAS DAERAH)							
		ANGGOTA	SEKRETARIS	KETUA	PENANGGUNGJAWAB	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
1	Mengajukan usulan PBH/Penerima Bantuan Hukum yang akan dipantau dan dievaluasi berdasarkan serapan anggaran/laporan					Data PBH pada Aplikasi SID Bankum dan kuisioner	3 Hari	Data Pemberi dan Penerima Bantuan Hukum	
2	Mengoreksi usulan untuk disampaikan kepada Penanggungjawab					Data laporan Penerima Bantuan Hukum	2 Hari	Data untuk pemantauan dan evaluasi	
3	Menyampaikan usulan yang telah disetujui					Data laporan Penerima Bantuan Hukum	2 Hari	Daftar nama tim pengawas daerah	
4	Menerima arahan dari Ketua					Daftar nama tim pengawas daerah	1 Hari	Persiapan pemantauan dan evaluasi	
5	Menyiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan					Dokumen administrasi	2 Hari	Kelengkapan administrasi pelaksanaan kegiatan	
6	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi bantuan hukum serta menyusun laporan					- Surat Pengantar - Instrumen pemantauan dan evaluasi bantuan hukum - Data Pemberi	3 Hari	Laporan kegiatan dan rekomendasi	



						Bantuan Hukum - Data Penerima Bantuan Hukum			
7	Mengevaluasi laporan					Laporan pelaksanaan dan rekomendasi	3 Hari	Bahan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum	
8	Melaporkan hasil akhir kepada Penanggungjawab					Bahan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum	2 Hari	Evaluasi pelaksanaan bantuan hukum	

KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH BALI
JL. RAYA PUPUTAN NITI MANDALA RENON DENPASAR TELP/FAX. (0361) 224856

LEMBAR DISPOSISI DIVISI PPPH

Tgl. Diterima :	☐ Biasa	☐ Penting	Tgl. Penyelesaian : 13/5 25
	☐ Rahasia	☑ Segera	
Tgl. Surat :	13/05 25		

Perihal : SOP Money Bombum

Disposisi :

- mohon Paraf
- mohon Scrmaker

Dikoreksi oleh :

Peraturan Perundang-undangan

- ☐ Ketua Pokja I: Dewa Gede Pradnya
- ☐ Ketua Pokja II: I Eka Agustina

Pembinaan Hukum

- ☐ Penyuluh Madya: Ratih Rosymayuani
- ☐ Penyuluh Madya : Ida Ayu Putu Hera
- ☑ Penyuluh Madya: I Gede Adi Saputra
- ☐ Badan Strategi Kebijakan: I Putu Surya Dharma

Paraf :